

Dampak Dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Terhadap Perekonomian Di Indonesia

Delvi Aprillia

Universitas Riau

Supentri

Dosen, Universitas Riau

Alamat kampus: Simpang baru, kec. Tampan, kota pekanbaru, Riau

Korespondensi penulis: delvi.aprillia5365@student.unri.ac.id

Abstract. *President Jokowi has announced plans to transfer the nation's capital to the Timur Province. This needs to be carefully considered since it has the potential to be risky but can also provide positive effects. The goal of this endeavor is to stabilize Jakarta's position as a hub for business and government that has long been in decline, as well as to lessen economic tensions between the main island of Java and its neighboring islands. This article will analyze the economic climate as well as the risks that the government must address in this particular endeavor. Qualitative research method is a research method that is carried out with a type of descriptive approach. The results of the research obtained are the positive impact as well as the risk of the transfer of IKN to Central Kalimantan on the economy in Indonesia. Even if there are potential for PDB growth and inflation that is moderate, there are risks associated with renovation that should be considered, such as working together with the government to mitigate the risk of exceeding budget while building new infrastructure and cities. In addition, there is a potential inflation rate that is higher than expected due to the change in exchange rates, which is attributed to the DPR RI.*

Keywords: *The Transfer Of The Capital, Impacting And Risky, To The Economy In Indonesia*

Abstrak. Presiden Jokowi sudah mengumumkan rencana untuk memindahkan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati karena memiliki potensi untuk memberikan dampak positif sementara juga membawa risiko. Tujuan dari artikel ini adalah untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis utama, serta mengurangi kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan tempat-tempat lain. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan jenis pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah dampak positif serta risiko dipindahkannya IKN ke Kalimantan Tengah terhadap perekonomian di Indonesia. Laporan ini akan memeriksa dampak ekonomi serta risiko yang harus ditangani pemerintah dalam hal ini. Meskipun ada potensi yang signifikan untuk pertumbuhan PDB dan inflasi, ada risiko yang harus ditangani, seperti bekerja sama dengan pemerintah untuk mengurangi risiko yang terkait dengan pengembangan kota dan infrastruktur baru. Selain itu, ada potensi inflasi yang lebih tinggi akibat kenaikan harga komoditas, seperti yang diprediksi DPR RI.

Kata kunci: Pemindahan ibu kota, berdampak dan beresiko, terhadap perekonomian di Indonesia

LATAR BELAKANG

Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan relokasi kota asalnya ke Provinsi Kalimantan Timur. Untuk memulai proses ini, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah melakukan beberapa studi tentang bahasa yang akan digunakan di ibukota nasional. Bappenas mempengaruhi berbagai faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan potensi untuk pengembangan industri.

Pemerintah menyatakan bahwa alasan utama di balik pemindahan IKN dari Pulau Jawa adalah untuk pemulihan ekonomi. Menurut Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, kesenjangan ekonomi antara wilayah tersebut telah menghalangi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan pemindahan IKN, pemerintah berharap untuk mempercepat degradasi ekonomi dan mengurangi kesenjangan antara Jawa dan wilayah lainnya.

Beberapa negara telah memindahkan ibu kota nasional mereka, seperti Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia dan Australia dari Sydney ke Canberra. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan status kota sebagai pusat bisnis dan pemerintah, serta untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Kasus Rio de Janeiro menunjukkan bahwa tidak ada kerugian ekonomi yang signifikan, meskipun Brasilia mengalami pertumbuhan ekonomi.

Misalnya, ada banyak risiko yang terkait dengan relokasi infrastruktur nasional kritis (IKN) dari Jawa. Risiko utama terkait dengan pengembangan infrastruktur di area target untuk mendukung fungsi pemerintah. Meskipun pemerintah hanya menerima 19,2% dari total biaya Rp446 triliun melalui APBN, ada potensi kekayaan negara akan tumbuh jika proyek pengembangan swasta gagal. Akibatnya, makalah ini akan menyelidiki dampak ekonomi dan manajemen risiko selama proses relokasi IKN.

METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disebut deskriptif kualitatif analisis, yang melibatkan pengumpulan data melalui iklan televisi dan menggunakan teori buku sebagai sumber literasi. Studi ini berfokus pada dampak dan risiko ketidakpastian kebijakan internal pada ekonomi Indonesia, yang membuat metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis diferensial studi, yang mengharuskan penggunaan banyak referensi, seperti koran, majalah, dan sumber lainnya, untuk menganalisis perubahan di ibukota negara.

Studi ini menggunakan metode penelitian analisis kualitatif deskriptif, yang mengumpulkan data melalui iklan televisi dan menggunakan teori buku sebagai sumber literatur. Pendekatan kualitatif adalah deskriptif karena dampak dan bahaya ketidakpastian kebijakan internal pada ekonomi Indonesia adalah subjek utama studi ini. Untuk mengevaluasi perubahan di ibukota negara, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis diferensial studi, yang menuntut penggunaan referensi yang banyak, termasuk koran, Majalah, dan sumber lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Pemindahan ikn di Indonesia

Penting untuk mempertimbangkan manfaat dan kerugian relokasi dalam konteks Ibu Kota Negara (IKN) mindahan. Perhatikan keadaan saat ini di Jakarta, di mana kota ini mengalami kesulitan yang signifikan dalam melaksanakan fungsi ekonomi dan politiknya. Hal ini telah menyebabkan kebutuhan untuk membuat hubungan kota dengan Kutai Kartanegara dan wilayah Paserutara menjadi solusi yang layak. Perjalanan ibu kota harus diambil daripada dengan encanaan yang disesuaikan.

Ibu kota pemindahan harus diambil daripada dengan pertimbangan yang paling efisien. Mengingat urgensi dan perencanaan jangka panjang yang ditunjukkan Presiden Jokowi untuk ibukota negara, penting untuk mengakui kebutuhan untuk jenis perencanaan ini. Salah satu tujuan utama adalah mengatasi tantangan masa depan, seperti yang dinyatakan dalam Visi Indonesia 2045, di mana Indonesia diharapkan menjadi salah satu dari lima ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045. Diperkirakan bahwa pada tahun ini, GDP per kapita akan mencapai US\$ 23.119. Proyek ini juga menunjukkan bahwa Indonesia akan muncul dari perbudakan orang pada tahun 2036. Oleh karena itu, diperlukan transformasi ekonomi yang signifikan untuk mencapai visi Indonesia 2045. Transformasi ini akan terhambat oleh hilirisasi industri, penggunaan sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, penegakan peraturan, dan reformasi birokrasi yang baru-baru ini diterapkan.

Kedua, IKN perlu mendukung pertumbuhan ekonomi moderat dan luas di seluruh Indonesia, terutama di wilayah timur. Selama ini, Jakarta dan sekitarnya dikenal sebagai hub segala aspirasi, mulai dari pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, budaya, dan lainnya. Hal ini tidak diyakini bahwa nilai uang di Jakarta melebihi 70%,

bahkan jika wilayahnya hanya 664,01 km², atau 0,003% dari seluruh lahan Indonesia, yang adalah 1.919,440 km². Selain itu, Jakarta memiliki populasi 10,56 juta orang, atau 3,9% dari semua orang Indonesia, yang jumlahnya setidaknya 270,20 juta (Data tahun 2020).

Hal ini menghalangi pembangunan yang tidak merata dan perdamaian di Indonesia, dengan sebagian besar pembangunan negara ini terjadi di Jakarta dan pulau Jawa. Kondisi ini tidak mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, menghalangi penggunaan optimal potensi wilayah, tidak mendukung kesatuan regional, dan meningkatkan risiko bagi bangsa dan persatuan.

Karena itu, ada kebutuhan untuk Infrastruktur Ibu Kota Baru (IKN) yang dapat menangani tantangan ini, yaitu, menciptakan kota yang memenuhi standar internasional untuk semua warga Indonesia. IKN yang ditemukan di Kalimantan diharapkan menjadi mesin ekonomi berikutnya Indonesia, terutama di wilayah timur dan selatan. Diperkirakan bahwa IKN ini akan dapat mengidentifikasi penggerak utama pertumbuhan ekonomi baru dan memaksimalkan potensi rantai pasokan lokal.

Ketiga, kondisi Jakarta tidak setara, membuatnya kurang menarik sebagai IKN. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kepadatan penduduk rata-rata Jakarta, yang adalah 16.704 orang per km², dibandingkan dengan hanya 141 orang per kilometer persegi untuk seluruh Indonesia. Selain itu, Jakarta juga terkenal dengan kemacetannya, yang, meskipun menurun dari nomor 10 menjadi nomor 31 secara global pada tahun 2020, namun tetap menjadi satu-satunya kota paling penuh kemacetan di dunia. Faktor geologi dan lingkungan, seperti melanda tahunan Jakarta dan kerusakan tanah yang menyebabkan sebagian besar wilayah Jakarta berada di bawah pantai, juga berkontribusi pada pertanyaan mengapa Jakarta tidak lagi berkembang seperti dulu.

Argumen pro dan kontra telah muncul dari migrasi IKN dari Jakarta ke Kalimantan. Namun, sebagai bangsa demokratis, setelah kesimpulan-kesimpulan ini dicapai melalui proses demokratis yang diubah oleh Undang-Undang, semua anggota masyarakat harus mendukungnya. Bangsa Indonesia harus mengurangi dampak negatif dari pemindahan IKN yang disebutkan sebelumnya. Bahkan jika tidak semua orang setuju dengan pernyataan ini, mereka yang menawarkan manfaat yang lebih besar bagi orang Indonesia harus diakui sebagai mitra NKRI yang setia dan pengertian.

2. Dampak pemindahan ikn terhadap perekonomian

Menurut analisis Bappenas, IKN diharapkan memiliki dampak positif pada perekonomian nasional dengan probabilitas 0,1% kenaikan PDRB. Bappenas menjelaskan bahwa peningkatan PDRB ini akan terjadi karena penggunaan sumber daya tenaga kerja potensial, seperti pembangunan tenaga kerja untuk infrastruktur produktif dan pengembangan tenaga kerja bagi modal manusia yang kurang digunakan. Lebih khusus, Bappenas memprediksi akan ada kenaikan gaji pekerja di daerah sekitarnya, yang tercermin dalam kenaikan biaya tenaga kerja sebesar 1,37 persen.

Pemindahan pusat pemerintahan ke Kalimantan diharapkan memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah timur. Selain itu, diharapkan juga akan memperkuat perdagangan internasional, khususnya antara pulau Jawa dan Kalimantan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada skala global. Untuk memaksimalkan manfaat dari pengembangan kota baru ini, dasar yang kuat dalam produktivitas, inovasi, dan teknologi diperlukan.

Pemindahan ibu kota diperkirakan akan mengakibatkan kenaikan inflasi nasional minimal 0,3%, meskipun permintaan dari sisi permintaan diharapkan akan meningkat. Peningkatan inflasi ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan disposable populasi, yang kemungkinan akan tercermin dalam harga barang-barang dasar. Namun demikian, diperkirakan bahwa dampak inflasi tidak akan sangat signifikan dalam kaitannya dengan daya beli nasional karena meningkatnya biaya barang di lokasi IKN yang baru didirikan dan daerah sekitarnya. Akibatnya, diperkirakan bahwa infrastruktur yang lebih baik dan sektor manufaktur yang sukses akan mengurangi dampak inflasi. Hal ini juga diharapkan bahwa pembangunan kota baru ini akan mengakibatkan banyak pembukaan pekerjaan baru dan tingkat gangguan dan kemiskinan yang lebih rendah. Diperkirakan bahwa penduduk setempat dan investor akan mendapat manfaat ekonomi dari perubahan ini, dengan banyak investor berharap untuk berinvestasi saham mereka di wilayah yang terkena dampak.

Pindahnya ibu kota negara dari Jawa akan mendorong pertumbuhan perdagangan antardaerah di Indonesia. Sebagai hasil dari kampanye kesadaran, lebih dari setengah wilayah nasional Indonesia akan mengalami peningkatan aktivitas perdagangan. Selain itu, ibukota negara akan mendorong investasi di provinsi yang baru terbentuk dan sekitarnya dan

memberikan insentif untuk investasi ke daerah lain, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produksi ekonomi negara secara keseluruhan.

Sekitar Rp466 triliun total hilang akibat pembangunan 256.000 hektar lahan baru, 53,5% berasal dari APBN dan 46,5% dari KPBU, BUMN, dan sektor lainnya. Namun, pada saat ini, APBN berfokus pada mitigasi Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah ingin mengembangkan sektor-sektor baru seperti industri minyak, teknologi, farmasi, pariwisata, paripurna, dan perkebunan.

Dengan menjaga tingkat inflasi, pemindahan IKN akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan penerapan kebijakan tersebut. Hal ini diharapkan akan meningkatkan tingkat kohesi sosial di lokasi IKN baru dan memiliki potensi untuk mengurangi ketegangan ekonomi antara pulau-pulau IKN tetangga dan Pulau Jawa.

Selain potensi ekonomi, pengembangan IKN juga membawa risiko yang harus ditangani pemerintah, yaitu dalam kaitannya dengan investasi. Menurut Bappenas, ada dua skenario untuk total jumlah jaminan yang dibutuhkan untuk pembiayaan IKN, yaitu sekitar Rp466 triliun dan Rp323 triliun. Jumlah keseluruhan persyaratan proyek sangat tergantung pada peran pemerintah dan jumlah Aparent Sipil Nation (ASN) yang akan dihentikan..

Untuk proyek konstruksi "kota baru" dibutuhkan infrastruktur yang substansial. Proyek infrastruktur selalu membawa risiko karena implementasinya mungkin tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Di sisi lain, kelompok pemangku kepentingan ingin mendapat manfaat sesuai dengan anggaran awal proyek. Ikatan Pengusaha Real Estate Indonesia (REI) menyatakan bahwa pendorong utama inflasi kemungkinan akan adalah tingkat upah. Ada kelemahan karena hanya beberapa organisasi yang mampu memanfaatkan sepenuhnya ruang yang tersedia, namun penggunaan ruang tersebut dapat dimodifikasi melalui skema aset pendayagunaan tanpa membahayakan kepentingan nasional. Dengan cara ini, risiko inflasi akibat kenaikan harga dapat dikurangi.

3. Resiko pemindahan IKN

Selain potensi ekonomi, pengembangan IKN memiliki risiko yang harus ditangani pemerintah, khususnya dalam hal investasi. Menurut Bappenas, ada dua skenario untuk jumlah total yang dibutuhkan untuk remodeling berdasarkan desain IKN: sekitar Rp466 triliun dan Rp323 triliun. Kebutuhan untuk renovasi ini sangat tergantung pada peran

pemerintah dan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan terpengaruh, termasuk pengembangan fungsi primer, fungsi sekunder, fungsi unjang, dan fungsi lahan.

Membangun “kota baru” membutuhkan infrastruktur yang luas. Proyek infrastruktur memiliki risiko tinggi karena implementasinya mungkin tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Organisasi sponsor ingin mendapat manfaat sesuai dengan anggaran awal proyek. Di bawah prinsip pembagian risiko, pemerintah harus menghargai upaya kolaboratif dengan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa infrastruktur baru dan ditingkatkan memenuhi persyaratan khusus untuk peluncuran pemerintah dan tidak membahayakan kualitas APBN.

Menurut Ikatan Pengusaha Real Estate Indonesia (REI), inflasi diperkirakan akan meningkat melampaui apa yang dihalangi oleh Bappenas. Mereka setuju bahwa harga tanah kemungkinan akan meningkat tajam sebagai tanggapan terhadap inflasi, terutama karena beberapa pemilik tanah besar memiliki tanah besar. Selain itu, spekulan kehadiran juga dapat mengakibatkan harga jatuh tanpa memburuk.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah harus hati-hati mempertimbangkan lokasi dan ukuran wilayah negara, menggunakan sumber daya apa pun yang mungkin dimiliki suatu negara atau BUMN. Menggunakan lahan ini dapat dilakukan melalui skema aset pendayagunaan tanpa menaikkan utang nasional, sehingga mengurangi risiko inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga lahan.

4. Pemindahan ikn dapat menyebabkan menurunnya kesenjangan antar kelompok pendapatan

Memindahkan ibu kota ke provinsi lain memiliki potensi untuk mengurangi pendapatan kesenjangan karena akan menciptakan lebih banyak jam kerja dan membantu merestrukturisasi distribusi penghasilan, baik secara lokal maupun nasional.

Dengan membuat pertumbuhan ekonomi yang lebih hati-hati, tingkat kesenjangan pendapatan dapat terlihat penurunan. Hal ini dapat dilihat dari perubahan 0,23 persen di harga median dan perubahan 1,37 persen di tenaga kerja harga. Upah margin ini akan dipengaruhi oleh produk upah marginal. Satu dampak negatif potensial yang mungkin timbul adalah kemungkinan masuknya pendatang baru sebagai akibat dari pelecehan terhadap orang tua.

Hanya sedikit meningkatkan inflasi menjadi 3,30% dari 3,12% pada tahun lalu, ketika semakin ditambalikan dan dapat ditoleransi dengan dampaknya relativit minimum. Perubahan biaya tenaga kerja akan tercermin dalam perubahan harga marginal produk dari biaya tenaga tenaga kerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan studi yang telah selesai, dapat disimpulkan bahwa IKN memiliki risiko dan efek menekan pada perekonomian Indonesia. Meskipun reformasi IKN memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sambil mengurangi inflasi, ada risiko yang terkait dengan perubahan, terutama dalam pembangunan kota dan infrastruktur baru. IKN juga memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan industri di wilayah sekitarnya, yang pada gilirannya dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara Semenanjung Jawa dan daerah sekitarnya. Oleh karena itu, untuk memastikan penggunaan lahan secara efektif dan meminimalkan kemungkinan inflasi akibat harga lahan yang tidak stabil, pemerintah harus memperhatikan kualitas lahan dan rasio luas lahan. DPR RI juga secara berkelanjutan memantau perkembangan pembangunan IKN baru, komisi V (infrastruktur), komisi XI (keuangan), dan komisi terkait lainnya, melalui mekanisme pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alinda, R., & Adinugraha, H. H. (2022). Pengaruh logo halal, kesadaran halal, dan sikap konsumen untuk kembali membeli produk makanan dan minuman kemasan. *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam*, 2(2).
- Bappenas. (2019, June 26). Dampak ekonomi dan skema pembiayaan pemindahan ibu kota negara. Paparan dalam Dialog Nasional II: Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green, and Beautiful.
- Hasibuan, R. R. A., & Aisa, S. (2020). Dampak dan resiko perpindahan ibu kota terhadap ekonomi di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 183.
- Khoiriamal, G., Athallah, Z. Z., Basilla, W. D., & Adinugraha, H. H. (2022). Pelatihan pembukuan sederhana dan strategi pemasaran pada UMKM di Desa Podosugih. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesosi*, 5(2).
- Kristianto, A. (2022). Perpindahan ibu kota berdampak positif terhadap ekonomi nasional. *Kumparan*. <https://kumparan.com/tulisanqu19/perpindahan-ibu-kota-berdampakpositif-terhadap-ekonomi-nasional-1xLt8Q3DfjB/full>

- Liputan6.com. (2019, June 26). Pemindahan ibu kota dongkrak inflasi 2%. Liputan6. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3998755/pemindahan-ibu-kotadongkrak-inflasi-02-persen?>
- Nainggolan, E. U. P., & Kakanwil DJKN, K. K. B. (2022). Urgensi pemindahan ibu kota negara.
- Pujianto, E., & Adinugraha, H. H. (2022). Marketing strategy for convection production results in Samong Village, Ulujami District, Pemalang. MUAMALATUNA, 14(2).
- Silalahi, S. A. F. (2019). Dampak ekonomi dan risiko pemindahan ibu kota negara. Info Singkat Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 9(16), 19–24.
- Tribunnews.com. (2019, August 21). Pemindahan ibu kota. Tribunnews. <https://kaltim.tribunnews.com/2019/08/21/pemindahan-ibu-kota-rei-kaltimkhawatir-inflasi-tinggi-bisa-gagalkanpenetapan-lokasi-ibu-kota-baru>